

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Oleh PT. BRI Cabang Balikpapan”(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 3141 K/Pdt/2014). Tujuan penelitian adalah : 1. Untuk menganalisis apakah alasan permohonan pembatalan lelang eksekusi Hak Tanggungan yang diajukan oleh Mansyur selaku debitur mempunyai alas hak yang sah. 2. Untuk mengetahui apakah pertimbangan hukum dan putusan Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3141 K/Pdt/2014 telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Berdasarkan hasil analisis dapat diambil kesimpulan bahwa : 1. Alasan Debitur mengajukan keberatan atas dilakukannya eksekusi Hak Tanggungan tidak mempunyai dasar hukum yang sah, karena Kreditor dalam melakukan eksekusi obyek hak tanggungan telah sesuai dengan Pasal 6 UUHT, yaitu : a) debiturnya wanprestasi, b) dilakukan melalui pelelangan umum yaitu KPKNL. 2. Dasar pertimbangan dan putusan Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan tidak sesuai dengan teori hukum jaminan kebendaan, sedangkan dasar pertimbangan dan putusan Pengadilan Tinggi Samarinda serta Mahkamah Agung sesuai dengan teori hukum jaminan kebendaan khususnya hak tanggungan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UUHT.

Kata Kunci : Lelang eksekusi Hak Tanggungan, Parate Eksekusi.

ABSTRACT

This thesis entitled “Tinjauan Yuridis Terhadap Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Oleh PT. BRI Cabang Balikpapan”(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 3141 K/Pdt/2014). The research objective are : 1. To analyze whether the reason for the cancellation request Mortgage auction execution filed by the debtor Mansyur so entitled as legitimate. 2. To determine whether the legal considerations and decisions of Judges in Supreme Court Decision No. 3141 K /Pdt / 2014 in accordance with applicable laws .

Based on the results of the analysis can be concluded that : 1. The reason Debtor filed an objection to the execution Mortgage does not have a valid legal basis, because creditors in execution object security rights in accordance with Article 6 UUHT, namely : a) the debtor defaults , b) is carried out through a public tender KPKNL. 2. Basic considerations and Balikpapan District Court Judge's decision is not in accordance with the legal theory of collateral material , whereas the consideration and decision of the High Court of Samarinda along with the Supreme Court in accordance with the legal theory in particular material guarantees security rights as stipulated in Article 6 UUHT.

